

Tinjauan Mata Kuliah

Mencermati pelaksanaan pengelolaan keuangan publik di Indonesia yang penuh dinamika perubahan, mutlak diperlukan pemahaman yang benar tentang pengelolaan keuangan publik baik pada Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Pemahaman yang benar akan menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan publik dalam menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di berbagai bidang sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan pengelolaan keuangan publik tidak berdampak negatif yang banyak menimbulkan beban masyarakat suatu bangsa.

Buku Materi Pokok (BMP) Keuangan Publik memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan *skill* terutama bagi penyelenggara negara di dalam mengelola keuangan publik.

BMP Keuangan Publik sangat erat kaitannya dengan fenomena yang ada sekarang ini. Reformasi kebijakan keuangan publik memunculkan paradigma baru yang mengubah urgensi keuangan publik di semua tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh terhadap penataan kembali sumber-sumber keuangan baik pengelolaan keuangan pusat maupun keuangan daerah. Paradigma baru keuangan publik tentang pengelolaan sumber-sumber keuangan lebih banyak didesentralisasikan kepada daerah. Pengelolaan keuangan publik bergeser dari pola yang sentralistik menjadi lebih desentralistik. Daerah mendapat kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan baik dalam penggalan dan optimalisasi sumber-sumber maupun dalam belanja daerah. Sumber-sumber keuangan publik diatur kembali dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sehingga mengubah struktur penerimaan baik di pusat maupun di daerah. Dampak dari upaya optimalisasi sumber-sumber harus dikaji secara matang, agar risikonya kecil. Belanja negara dan belanja daerah harus dikendalikan secara saksama sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pemahaman kedua sektor ini merupakan bahan untuk penyusunan anggaran baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara berantai disajikan pula cara-cara menutup atau mencari jalan ke luar andaikata terdapat anggaran defisit, utang negara, dan utang daerah menjadi alternatif pilihan dari berbagai alternatif yang semuanya mengandung risiko. Kebijakan-kebijakan keuangan publik merupakan pengendalian oleh pemerintah dalam menciptakan kondisi stabil dalam penyelenggaraan keuangan publik.

Di dalam mempelajari BMP Keuangan Publik, Anda pertama-tama harus mempelajari pergeseran pengelolaan Keuangan Publik yang disajikan dalam Modul 1, yaitu Paradigma Baru Keuangan Publik dan Ruang Lingkupnya. Materi ini harus Anda kuasai, kemudian penguasaan ditingkatkan pada Modul 2, yaitu Pengeluaran Negara. Setelah materi ini Anda kuasai, maka penguasaan materi ditingkatkan lagi pada Modul 3, Dampak Pengeluaran Negara. Setelah Dampak Pengeluaran Negara dikuasai, Anda

diharuskan menguasai materi Modul 4, Dasar dan Struktur Penerimaan Negara. Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara yang ideal harus dikuasai secara menyeluruh pada Modul 5. Penggunaan pajak kepada masyarakat mempunyai implikasi maka dampak atau Pengaruh Pajak dalam Perekonomian dapat Anda pelajari dalam Modul 6. Agar penguasaan materi menjadi lebih lengkap, Anda diharuskan mempelajari Modul 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Materi ini harus Anda kuasai untuk dapat meningkatkan penguasaan materi tentang Utang Negara dan Pinjaman Daerah yang disajikan pada Modul 8, juga dalam menguasai materi Kebijakan Keuangan di Indonesia pada Modul 9.

Rangkaian isi pembahasan BMP Keuangan Publik dapat dilihat pada peta kompetensi berikut.

Peta Kompetensi Keuangan Publik/IPEM4440/3SKS

